

Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Rasanae Barat Kota Bima

Nofita

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara/Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Korespondensi penulis: nofitanovi32@gmail.com*

Abstract. *This study aims to determine the Leadership Function in Improving Public Services at the West Rasanae Sub-District Office, Bima City. Because it is expected that the leadership function of the Camat can improve employee work services. This research refers to the indicators of Hadari Nawawi's leadership function (1992). This research was conducted at the West Rasanae Sub-District Office, Bima City. Camat Rasanae Barat and sub-district employees. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documents and field notes. Then the data was analyzed descriptively qualitative. The results showed that the leadership function in improving public services can be said to be optimal, indicators: 1) consultative 2) participation 3). although public services are still categorized as not optimal, namely instructive indicators. However, the participatory function has been maximized. Judging from the participation of employees in the activities and work plans of the sub-district government, who are always active and consultative, the progress of human resources is still low so that they cannot plan properly for instructions from the sub-district head, such as there are still employees who lack mastery of technology and the ability to operate computers so that office work cannot be completed in a timely manner.*

Keywords: *Leadership Function, Service, and Public.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Rasanae Barat Kota Bima. Karena diharapkan fungsi kepemimpinan dari Camat dapat meningkatkan pelayanan kerja pegawai. Penelitian ini dengan mengacu pada indikator fungsi kepemimpinan Hadari Nawawi(1992). Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Rasanae Barat Kota Bima. Camat Rasanae Barat dan Pegawai Camat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen dan catatan lapangan. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik sudah dapat dikatakan optimal, indikator : 1) konsultatif 2) partisipasi 3). walaupun pelayanan umum masih dikategorikan belum maksimal yaitu indikator instruktif. Namun pada fungsi partisipatif sudah maksimal. Dilihat dari keikutsertaan pegawai dalam kegiatan dan rencana kerja pemerintah kecamatan. Yang selalu aktif dan konsultatif kemajuan SDM yang masih rendah sehingga tidak dapat merencanakan dengan baik instruksi dari camat, seperti masih ada pegawai yang kurang menguasai teknologi dan kemampuan mengoperasikan komputer sehingga pekerjaan kantor tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Kata Kunci : Fungsi Kepemimpinan, Pelayanan, dan Publik.

1. INTRODUCTION

Kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang pemimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang kepemimpinan dengan berbagai sudut pandangnya. Kepemimpinan tidak dilihat dari satu sisi saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon pemimpin.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelegaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan”, pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea Ke-empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi sesuatu yang menjadi hambatan maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 5 ayat 2, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kecamatan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. Menurut George R. Terry (1960:493), bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemahaman tentang esensi kepemimpinan semakin diperkaya oleh pengalaman orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya diberi atau memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan, baik pada tingkat rendah, menengah, maupun tingkat puncak. Menurut Kolter dalam Sampara Lukman (2000 : 8) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lukman, 2000 : 6). Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2005 : 4).

Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis karena penyelenggaraan pelayanan publik merupakan wujud kinerja organisasi. Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik seharusnya dapat meningkatkan pelayanan dan menjamin penyediaan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan bahwa segera bentuk pelayanan yang dilakukan instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam jajaran pemerintah kecamatan, dimana upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 126 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain : mengkoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoodinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Adapun pelayanan publik yang ada di kantor Camat yaitu, Rencana Penggunaan Dana, Laporan Perkembangan Penggunaan Dana, Rekening Kas Pemerintah Desa, NPWP, APBDes Tahun Anggaran, Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pengurusan Kartu Keluarga, Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman.

Dalam meningkatkan pelayanan publik terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung kualitas pelayanan dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu kepemimpinan yang handal dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan perubahan dan pelaksanaan pelayanan publik, sumber daya pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal sehingga mewujudkan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara serta adanya pengawasan sampai kepada evaluasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan berkualitas dalam meningkatnya pelayanan publik. Maksudnya adalah penggabungan antara pemahaman teoritikal dan

empiris telah memberikan keyakinan yang semakin mendalam pada organisasi, tentang pentingnya fungsi kepemimpinan dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pemimpin harus menyadari bahwa dunia saat ini dihadapkan pada lingkup yang tanpa batas, dan beragama akan membuat organisasi semakin marak. Keberagaman dari segi usia, ras, agama, dan pengalaman akan memberikan sinergi terbaik bagi kemajuan organisasi.

Keberagaman akan membuat tiap-tiap orang mempunyai kualitas yang berbeda yang berbeda dan kualitas tersebut akan bisa saling mengisi satu sama lainnya. Akibatnya organisasi akan lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai benturan karena potensi yang dimiliki organisasi yang berkeanekaragaman. Menciptakan pemberdayaan, tim kerja yang solid, dan menghargai keberagaman dalam organisasi akan gagal jika pemimpin dan anggota masih terjebak didalam paradigma lama yang lebih menekankan pada pengawasan ketat, menciptakan stabilitas dan homogenitas. Masih banyak pemimpin yang sering mengarahkan bawahannya seperti mengarahkan mesin-mesin, sekali jadi dan sekali perintah. Hal tersebut sangat mustahil untuk membawa orang-orang didalam organisasi menjadi orang-orang yang handal dan mempunyai kualitas prima, jika seorang pemimpin tidak menggunakan hati dan sikap bijaknya untuk mengarahkan dan memberdayakan mereka. Manusia mempunyai hati dan jiwa serta kebutuhan yang harus terpenuhi secara baik, sehingga penghargaan manusiawi akan menjadi syarat utama untuk hasil yang maksimal. Pemimpin yang mempunyai perhatian tinggi, baik atas penyelesaian tugas maupun atas hubungan manusiawi, akan lebih efektif memimpin. Apalagi jika ia berlaku sebagai orang yang dapat menolong bawahannya ketika berada dalam kesulitan. Pemimpin hadir bukan untuk menanam beban dan kepedihan bawahannya. Akan tetapi, pemimpin hadir di tengah-tengah mereka dengan membawa kesejahteraan, rasa aman, dan penghargaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksana (mekanisme/produser). Untuk memperoleh dukungan seluruh jajaran secara efektif dan efisien, perlu diterapkan teknik atau prinsip kepemimpinan yang tepat dari seorang camat. Sehubungan dengan beratnya tugas dan kewajiban Camat tersebut, maka dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembanguna dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat, Camat harus memiliki kemampuan manajerial kepada seluruh jajarannya supaya dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan instansi.

2. METHODS

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian atau metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2009:63), Adapun yang menjadi informan informan kunci dalam penelitian ini adalah camat, sekretaris camat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan masyarakat Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sebanyak 10 orang. Teknik Pengumpulan Data menggunakan, a) Teknik observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, b) Teknik wawancara yaitu cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden, dan c) Teknik dokumentasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan catatan harian dan sebagainya

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Fungsi Instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerhatikan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa isi perintah, bilamana waktu memulai, melaksanakan, melaporkan hasilnya, dan dimana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin anggota kelompok organisasi hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin. Fungsi itu berarti juga keputusan yang ditetapkan pimpinan tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruktif perintah. Selanjutnya perintah tidak akan ada artinya, jika tidak dilaksanakan. Olehkarena itu sejalan dengan pengertian kepemimpinan, intinya adalah kemampuan pimpinan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah, yang bersumber dari keputusan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melaksanakan perintah. Untuk itu perintah harus jelas, baik mengenai apa yang harus dikerjakan isi

perintah maupun dari segi bahasa sesuai dengan tingkat kemampuan orang menerima dan harus melaksanakannya.

Dalam kondisi tingkat kemampuan pelaksana dinilai rendah, maka harus jelas pula dalam menyampaikan cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat melaksanakan perintah tersebut. Perintah yang jelas dari segi kepemimpinan berarti juga sebagai perwujudan proses bimbingan dan pengarahan, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan kelompok organisasi. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya, sebelum mencari sebab-sebabnya pada orang yang melaksanakan perintah, sebaiknya diteliti lebih dahulu sebelum dari sudut pemberian perintah tersebut. Kekeliruan atau kesalahan itu mungkin saja terjadi karena ketidakjelasan dalam menyampaikan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah harus dilaksanakan.

Namun penyampaian atau komunikasi yang disampaikan dari pimpinan kepada pegawai sudah jelas dan tepat sasaran. Pada kecamatan Rasanae Barat Kota Bima diketahui bahwa pada bagian pelayanan umum masih kurang maksimal yang diberikan pegawai kepada masyarakat, seperti pelayanan pembuatan e-KTP yang dinilai masih lamban dan bertele-tele pengurusannya, dikarenakan memang ada hambatan pada mekanisme yang tidak sesuai standar pelayanan.

B. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan. Konsultasi itu dapat dilakukannya secara terbatas hanya dengan orang-orang tertentu saja, yang dinilainya mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Di samping itu mungkin pula konsultasi itu dilakukannya untuk mendengarkan pendapat dan saran, apabila suatu keputusan yang direncanakannya ditetapkan. Selanjutnya konsultasi dapat pula dapat dilakukan secara meluas melalui pertemuan dengan sebagian besar atau semua anggota kelompok organisasinya. Konsultasi seperti itu dilakukan apabila keputusan yang akan ditetapkan sifatnya sangat prinsipil penting, baik bagi kelompok organisasi maupun sebagian besar seluruh anggotanya.

Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, yang

dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Konsultasi dapat berupa memberi kesempatan menyampaikan saran dan pendapat sebelum atau sesudah keputusan ditetapkan. Konsultasi sebelum keputusan ditetapkan dapat terjadi apabila pemimpin bersikap terbuka, sehingga meskipun anggota hanya mendengar suatu isu atau sekedar menduga akan ditetapkan suatu keputusan, selalu dibenarkan untuk membicarakan kesempatan bertanya, jika setelah diturunkan berupa perintah ternyata tidak jelas.

Di samping itu seperti dikatakan diatas dapat pula digunakan untuk menyampaikan pendapat dan saran, dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan keputusan atau pelaksanaannya. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pemimpin, akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstuksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. Fungsi konsultatif ini mengharuskan kepemimpinan belajar menjadi pendengar yang baik, yang biasanya tidak mudah melaksanakannya, mengingat pemimpin lebih banyak menjalankan peranan sebagai pihak yang didengarkan. Camat Rasanae Barat sebagai pimpinan dari bawahannya juga sebaiknya meyakinkan diri, memiliki gagasan, aspirasi, saran dan pendapat yang konstruktif bagi pengembangan kepemimpinannya.

Untuk itu pemimpin harus meyakinkan dirinya bahwa dari siapapun juga selalu mungkin diperoleh gagasan, aspirasi, saran dan pendapat konstuktif bagi pengembangan kepemimpinannya. Memang fungsi ini dibutuhkan karena memang mengingat konsultasi sangat membantu pegawai dalam memecahkan masalah yang dihadapinya serta dapat melakukan konsultasi dengan pimpinannya. Di Kecamatan Rasanae Barat sendiri, hal ini udah dijalankan oleh pimpinan, dan implementasi dari fungsi ini adalah pegawai menjadi dapat menginstropeksi dirinya guna mengevaluasi semua yang sudah dikerjakan, serta dapat menciptakan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki.

C. Fungsi Partisipasi

Kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan pegawai. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan seorang pemimpin mengikutsertakan anak buah bersama-sama berperan didalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan seperti ini diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai kemampuan. akan tetapi kurang memiliki kemauan kerja dan kepercayaan diri.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) dalam bukunya dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, keterampilan, barang dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Selain itu telah dipahami juga bahwa kepemimpinan dengan menggunakan gaya atau model partisipatif yaitu seorang pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut atau bawahan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Wewenang dari seorang pemimpin yang diberikan kepada bawahan terukur dan sebatas wewenang yang diberikan organisasi dan kedudukannya. Hubungan yang terjalin dan bersifat kekeluargaan antara atasan dan bawahan dapat dihindari sehingga mereka melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan aturan organisasi fungsi delegasi.

Sehingga pada kantor Camat Rasanae Barat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan target pemimpin harus melibatkan bawahannya, guna pegawainya. Dalam sistem ini pola komunikasi yang dilakukan oleh Camat Rasanae Barat adalah komunikasi dua arah dengan memberikan kebebasan kepada bawahan untuk menyampaikan seluruh ide ataupun permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Informan yang merupakan petugas atau pegawai di Kantor Camat Rasanae Barat Kota Bima. Pegawai Kantor Camat Rasanae Barat juga selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan kantor maupun acara yang melibatkan pemerintahan kantor Camat Rasanae Barat. Hal ini menjadi penting karena partisipasi dapat meningkatkan prestasi/pelayanan kerja pegawai Kantor Camat Rasanae Barat Kota Bima.

D. Fungsi Delegasi

Menurut (Rokar: 2010) ddalam hal ini delegasi ini pemimpin biasanya memberikan suatu tanggung jawab kepada orang lain dalam hal ini bawahannya untuk melaksanakan kegiatan yang biasanya dikerjakan oleh pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahan yang ia beri delegasi. Dalam menjalankan delegasi ada hal yang perlu diperhatikan sebab sebuah delegasi mempunyai resiko dan rasa takut pemimpin karena adanya jarak antara kita dan orang yang kita serahi delegasi yang perlu diperhatikan :

- a. Apa yang didelegasikan

- b. Komunikasi terbuka antara orang yang menyerahkan delegasi dan orang yang menerima delegasi
- c. Kejelasan isi delegasi
- d. Harapan yang diletakkan pada orang yang diletakkan delegasi
- e. Kekuasaan yang diserahkan
- f. Pengawasan yang wajar
- g. Orang yang disertai delegasi.

Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh pemimpin dalam memberikan delegasi pada bawahan, adapun hal-hal yang dapat membantu, antara lain:

- a. Perhatikan orang yang hendak kita beri delegasi, mengapa orang itu kita minta dan apa tepatnya hal yang akan kita minta kepadanya
- b. Jelaskan permintaan itu dengan tenang dan dalam situasi santai, orang yang akan kita beri delegasi kita beri latar belakang tugas dan hal-hal yang mungkin tersangkut dalam tugas itu
- c. Sampaikan harapan kita dan jelaskan kekuasaan yang kita berikan kepadanya. Dan mintalah dia mulai bekerja melaksanakan tugas yang kita serahkan kepadanya
- d. Jika dia sanggup, beritahukanlah bagaimana kita dapat membantunya demi suksesnya pelaksanaan tugas itu
- e. Hendaklah kita setia pada kesepakatan yang telah dibuat, apabila dia ingin perubahan bicarakanlah pada dia dan utarakan alasan-alasannya. Jika delegasi sudah selesai ucapkanlah terimakasih kepadanya, bahkan dimuka umum jika diras tepat.

Pendelegasian yang dilaksanakan dan ditentukan oleh Camat kepada pegawainya seringkali diwewenangkan dengan Sekretaris Camat yang memang paling sering menerima delegasi ini. Namun tidak semua pegawai diberikan delegasi, karena memang mengingat kepentingan dari suatu tugas delegasi tersebut, dan kenyataan dilapangan juga menunjukkan masih banyak pegawai yang tidak mencukupin dalam hal SDM nya untuk diberikan delegasi ini.

4. CONCLUSIONS

Fungsi Instruktif, belum terkategori optimal, namun kenyataannya implementasi dari pelayanan kerja pegawai belum mengalami peningkatan. Fungsi konsultatif, sudah memperlihatkan hasil yang maksimal, dikarenakan pimpinan mampu berkonsultasi dengan pegawainya, outputnya adalah pegawai menjadi dapat memecahkan masalah, lebih termotivasi dan percaya diri dalam kinerjanya Fungsi partisipasi, fungsi ini sudah memperlihatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pelayanan/prestasi kerja pegawai dalam aspek kerjasama dan kesadaran pegawai untuk saling bekerja sama tim juga. Fungsi delegasi, walaupun masih ada sebagian kecil pegawai yang masih kurang SDMnya, tetapi fungsi ini sudah terlaksana dan optimal, dikarenakan pendelegasian ini sudah tepat didelegasikan oleh pimpinan.

REFERENCES

- Chairi, A., Darwis, M., & Jamaluddin. (2016) Pengaruh Fungsi Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Jurnal Office, 2(1), 1-8.
- Edyanto,& Karsiman. (2018). Leadership Bupati Dalam Pembangunan di Kabupaten Tambrau (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrau).sosio e-kons, 10(2), 143.
- Eko purnomo.(2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi.Sosio E-Kons. 10(1),28-38.
- Iriawan, H. (2020). Peranan Leadership Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota.Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 4(1), 40-45.
- Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- Kartono, Kartini. 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lano,P.F. (2005). Fungsi kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai. Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik, 4(1),74-81.
- Moleong, lexy, J. 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Motivasi Kerja Dengan Kepuasan Kerja Variabel Intervening, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 21(2), 157-173.
- Nawawi , Hadari & Hadari, Martini, M. 2004. Kepemimpinan Yang Efektif, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Setiyono, Budi. 2012. Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Silalahi, Ulbar. 2002. Pemahaman Praktis Asas- Asas Manajemen. Bandung. Mandar Maju.
- Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima Bumi Aksara
- Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV.ALVABETA Thoha, Mifta. 1990, Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta, Rajawali.
- Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Thoha, 2004. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Penerbit Sangkala
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
- Winardi, J. 2002. Motivasi dan pemotivasi Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2000. Kepemimpinan Dan Manajemen. PT Rineka Cipta. Jakarta.